



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASDAR ANDI BENNU, SP**
2. Jabatan : **ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN**
3. NHK : **490775**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.695.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m²/253 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 1915 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1364 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 2180 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 7000 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/36 m² di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 5000 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 389.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, SUZUKI JIMMY SUPER 1000 HARDTOP/JEEP Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMMY SUPER 1000 HARDTOP/JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000



4. MOTOR, HONDA SPDMOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	58.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.081.737
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.148.081.737
III. HUTANG	Rp.	233.112.093
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.914.969.644

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.